

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat tetap eksis di pasar global. Apalagi sudah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di tahun 2016 lalu meningkatkan tuntutan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam teori agensi.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ukuran kinerja perusahaan pada periode tertentu. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah informasi mengenai laba. Informasi mengenai laba merupakan unsur penting yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Informasi laba haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya justru seringkali

pihak manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba untuk memaksimalkan kepuasan mereka sendiri.

Tindakan manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba mengindikasikan adanya praktik manajemen laba (*earnings management*) pada perusahaan. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge *et al.*, 2008). Langkah yang kemudian diambil agar keduanya dapat dicapai adalah dengan memanipulasi laba menjadi lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tapi tidak untuk pelaporan pajaknya.

Fenomena adanya praktik manajemen laba sering terjadi, sebagai contoh yaitu kasus pada PT Inovisi Infracom (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba

bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrument keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp59 miliar.

Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk (<http://www.bareksa.com>, diposting pada: 25 Februari 2015, diakses pada: 20 februari 2017, pukul 13.30 WIB).

Fenomena manajemen laba yang terjadi di Bursa Efek Indonesia, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Kasus Manajemen Laba di Indonesia

No	Perusahaan	Kasus
1	Sinar Mas Group	Melakukan pelanggaran kegagalan mengumumkan kepada publik informasi material berupa penandatanganan perjanjian penyelesaian dengan krediturnya, tidak mengumumkan laporan keuangan tahunan, dan tidak menginformasikan kepada Bapepam mengenai gugatan piutang dagang dalam jumlah yang cukup material.
2	Indomobil	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan bahwa tender penawaran saham perusahaan ini mengandung praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pemegang tender bekerja sama dengan penjual, penasehat keuangan dan pendamping tender.
3	Kimia Farma	Perusahaan diduga melakukan mark up laporan keuangan, yang menggelembungkan laba sebesar Rp 32.668 miliar. Kasus ini menyeret KAP yang mengaudit perusahaan ini meskipun KAP ini yang berinisiatif melakukan adanya overstated itu.
4	Lippo Bank	Menerbitkan 3 versi laporan keuangan sekaligus yang saling berbeda antara satu dengan yang lain, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan dalam media massa, laporan keuangan yang dilaporkan kepada Bapepam, dan laporan keuangan yang disampaikan akuntan publik kepada manajer perusahaan ini. Selain itu, perusahaan ini dinilai telah mencantumkan pendapatan audit secara tidak hati-hati.

(Sumber : Sulistyanto, 2008:147)

Salah satu motivasi perusahaan melakukan manajemen laba adalah pajak. Bagi sebuah negara pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan, apalagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Tanpa pajak kehidupan negara tidak

akan berjalan dengan baik. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak.

Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun.

Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam buku Sukrisno Agoes (2013:6) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal-balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berlawanan dengan pemerintah mengenai tujuan pajak di atas, bagi perusahaan, pajak penghasilan adalah bagian laba bersih yang dibagikan ke pihak lain (pemerintah), sehingga pajak akan mengurangi bagian laba yang seharusnya dapat dibagikan ke pihak manajemen, pemilik modal atau dimanfaatkan untuk peningkatan investasi perusahaan. Perusahaan berkeinginan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, perusahaan merasa tidak memperoleh manfaat setelah pembayaran pajak tersebut .

Sedangkan pemerintah menganggap pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah selain dari sumber penerimaan migas dan non migas. Sehingga beberapa perusahaan melakukan manajemen laba dengan melakukan penurunan laba yang didasari oleh kepentingan perusahaan dalam berupaya untuk meminimalkan beban pajak.

Manajemen laba dapat dilakukan dengan pemerataan laba (*income smoothing*), *taking a bath*, dan *income maximization*. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*).

Menurut Phillips, Pincus and Rego (2003) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Sedangkan menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. Penelitian Phillips et al. (2003) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai hubungan yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai probabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan terjadinya bias apabila menggeneralisasi seluruh beban pajak tangguhan sebagai komponen diskresioner. Hal ini disebabkan beban pajak tangguhan dapat timbul karena perbedaan yang tidak dapat dihindari antara standar akuntansi dan pajak.

Penelitian ini juga meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba karena perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. Menurut Arles P. Ompusunggu (2011:5), *Tax Planning* yaitu suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat

pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba mengkaji permasalahan mengenai manajemen laba dalam hubungannya dengan perpajakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Ghafara Mawaridi Mazini (2015) meneliti perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, discretionary accrual tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Adapun penelitian yang dilakukan Ferry Aditama dan Anna Purwaningsih (2013) berhasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.

Selain beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak, variabel lain yang tidak diteliti penulis tetapi bisa mempengaruhi manajemen laba yaitu diantaranya adalah asset pajak tangguhan, penurunan tarif pajak, tingkat hutang perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, dan masih banyak variabel lainnya.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Yana Ulfah pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan. Selain itu, perencanaan pajak juga

memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba.

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya serta objek penelitian ini. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2012 hingga tahun 2016. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, bukan perusahaan manufaktur seperti pada penelitian Yana Ulfah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terdorong untuk menulis skripsi dengan judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas ,maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahannya yaitu :

1. Bagaimana beban pajak tangguhan pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagaimana perencanaan pajak pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagaimana praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Seberapa besar pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Seberapa besar pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara simultan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, mengumpulkan dan mengolah data informasi yang akan digunakan sebagai bahan penulisan skripsi. Sedangkan tujuan lain dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui beban pajak tangguhan pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk mengetahui perencanaan pajak pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak, adapun kegunaan penelitian ini diarahkan pada kegunaan praktis dan teoritis yaitu:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

- a. Untuk membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik yang sesungguhnya diterapkan pada instansi.
- b. Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam teori-teori yang telah dipelajari.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat siding guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.

2. Bagi Instansi

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang dapat digunakan untuk bahan pertimbangan terutama yang menyangkut perlakuan peraturan perpajakan terhadap laporan keuangan komersial untuk menentukan laba kena pajak.

3. Bagi Pihak Lainnya

Sebagai bahan referensi khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada perusahaan jasa sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang *go public*, yaitu yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama periode lima tahun (2012-2016).